



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,95%

Jumlah	163 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 61	
	PEREMPUAN : 102	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 2	
	SD : 3	Diploma 2 : 0
	SMP : 11	Diploma 3 : 3
	SMU : 54	S1 : 88
	Diploma 1 : 0	S2 : 2
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 49	SWASTA : 22
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 2
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 90	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,982
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000
3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa petugas PTSP sudah berkomitmen memberikan pelayanan yang gratis dan transparan sesuai dengan amanat Pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun yang selalu diingatkan pada saat apel dan super visi pada PTSP Pengadilan Negeri Simalungun. Bahwa pengguna layanan yang pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dapat membuat laporan/ pengaduan secara online melalui aplikasi siwas dan link akses ditampilkan diruang PTSP ataupun pengaduan secara langsung ke Pengadilan Negeri Simalungun.
2. Bahwa pengguna layanan selalu mendapatkan informasi tentang tarif/biaya yang dapat diakses dengan mudah baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, sehubungan biaya juga sudah ada tertera dimeja pelayanan dan diberikan informasi yang jelas oleh petugas PTSP dan tindak lanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memperbaharui nilai biaya segera setelah ada ketentuan perubahan atas tarif dan biaya tersebut.
3. Bahwa pimpinan dan jajaran pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun telah berkomitmen untuk melaksanakan wilayah bebas korupsi, gartifikasi, kolusi dan nepotisme sehubungan itu pimpinan dan seluruh jajaran pegawai membuka akses seluasnya kepada pengguna layanan untuk dapat melaporkan praktek KKN melalui aplikasi lapor, siwas, email, surat atau datang langsung. Demikian juga petugas PTSP Pengadilan Negeri Simalungun memberi akses kepada pengguna layanan bahkan membimbing cara untuk membuat laporan jika diketahui ada praktek KKN di Pengadilan Negeri Simalungun sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

23 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri